

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menggambarkan proses penyusunan dan substansi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan serta hal-hal apa saja yang terkait dan berpengaruh pada perencanaan di Sumatera Selatan. Selain itu dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan Prioritas Nasional dalam RKP yang diterjemahkan dalam RKPD, termasuk bagaimana penentuan isu strategis, terkait dengan permasalahan daerah serta kebijakan dan sasaran serta target yang akan diambil.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang sekaligus akan menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta tahun kedua pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2019-2023. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: "*Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD*". Oleh karena itu, penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (sampai ditetapkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029), RKP 2025, Program Strategis Nasional Tahun 2025, serta pedoman penyusunan RKPD 2025.

Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2025 juga tetap mempertimbangkan dokumen *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian secara teknokratis RKPD ini sudah dapat

mengakomodir apa yang diharapkan dari dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana proses penyusunan perencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 juga melihat capaian pembangunan tahun lalu sebagai *baseline*/dasar perencanaan ke depan, khususnya apa yang sudah diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa capaian yang belum tercapai secara optimal, serta isu strategis yang akan dihadapi di tahun 2025 juga menjadi perhatian.

Isu-isu yang bersifat lokal, seperti penurunan kemiskinan dan stunting, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan, pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta kelanjutan proyek strategis nasional dan integrasi pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Sumatera Selatan. Hal ini karena selain isu tersebut menjadi atensi publik, bukan hanya di Sumatera Selatan dan nasional, juga karena masih terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, merupakan implementasi dari tahun kedua RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan sekaligus akan menjadi tahun pertama RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari periode pertama RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah lanjutan dalam pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan tahun penutup pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 menuju pembangunan periode selanjutnya sebagai langkah awal dalam mencapai target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari

tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini RPD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2025, RKPD Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam RPD Sumatera Selatan 2024-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5 ^{b)}
		Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Rp.Juta/Kapita	80,77-80,89 ^{a)}
		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,02
		Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090
	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan)	%	5,74
		Nilai Tukar Petani	Nilai	109,56
	Meningkatnya ekosistem inovasi	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	2,75
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum	%	12,85
	Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah	Neraca perdagangan	US\$ Juta	4.297,41
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku	%	15,82
	Terkendalinya laju inflasi daerah	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1 ^{a)}
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	%	4,88
	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase peningkatan desa maju dan mandiri	%	6,22
	Meningkatnya kemandirian transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang mandiri	%	75,00
Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37 ^{b)}
		Gini Ratio	Ratio	0,316-0,320 ^{b)}
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93 ^{b)}
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	Pengeluaran per kapita	Rp.000/kapita/bln	11.364
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,05

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial	%	82,50
		Persentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin	%	4,50
Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,47
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5
		Prevalensi Stunting	%	13,3
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,86
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,70
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,66
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,19 ^{c)}
		Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66
		Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,90
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60,13
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks	43,60
		Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL)	Indeks	82,02
	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	Persentase penurunan tingkat kerentanan bencana	%	5,00
		Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	%	10,00
Peningkatan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,25 (B)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80,88
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Integritas Daerah	Indeks	74,13
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,62 ^{a)}

Sumber: RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026
Keterangan: ^{a)} Kesepakatan pada Rakortekrenbangnas 2024; ^{b)} Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 15 Mei 2024; ^{c)} Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, perlu dilakukan perumusan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, telaah RKP Tahun 2025, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah sesuai gambar berikut.

Gambar 4.1.
Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025



Untuk menentukan program, kegiatan, sasaran, indikator dan target maka dalam penyusunan Prioritas Daerah RKPD tahun 2025, Pemerintah Provinsi melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2025



Dengan mempertimbangkan arahan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, RKP tahun 2025, Raperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yaitu **“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”** dengan 4 (empat) Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yaitu :

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- 2. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
- 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

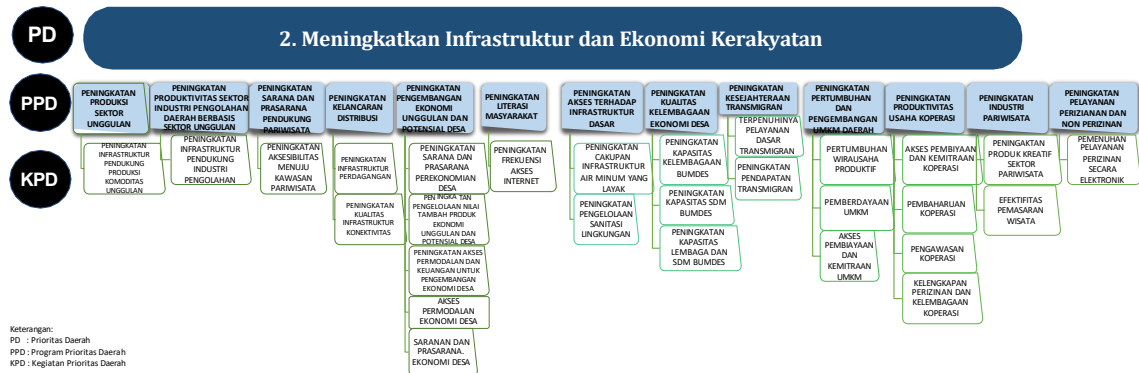
Isu Strategis	Prioritas Daerah RKPD 2025
Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting	PD1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing	
Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi	PD2 : Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung Pemerataan Infrastruktur	
Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana	PD3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	PD4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahun 2025, maka setiap Prioritas Daerah dijabarkan menjadi sejumlah Program Prioritas Daerah (PPD) dan Kegiatan Prioritas Daerah (KPD), yaitu sebagai berikut:

PRIORITAS DAERAH 1



PRIORITAS DAERAH 2



PRIORITAS DAERAH 3



PRIORITAS DAERAH 4



Penetapan Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tersebut disusun dengan mempertimbangkan dan menelaah beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

4.2.1.1. Telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Kebijakan pembangunan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi pembangunan jangka panjang yang tercantum di dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, yaitu:

SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2005-2025 tersebut sebagai berikut:

Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.

Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi

lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Selain melihat dari visi, penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan ini juga memerhatikan Arah Kebijakan RPJMD tahap keempat pada dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga diarahkan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul, dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mencakup tahapan sebagai berikut:

- a. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi
- b. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
- c. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan
- d. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi				
	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Perwujudan transformasi ekonomi	1	Penguatan kualitas agribisnis daerah
			2	Peningkatan kualitas regulasi usaha pertambangan
			3	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perikanan
	Meningkatnya ekosistem inovasi		4	Penguatan kajian pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata			
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM		5	Mendorong berkembangnya kewirausahaan daerah
	Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah		6	Pemberian subsidi ekspor kepada pelaku usaha
	Terkendalnya laju inflasi daerah	Peningkatan kondusivitas perekonomian wilayah	7	Menjaga produksi (supply) barang dan jasa secara periodik
	Meningkatnya investasi daerah		8	Peningkatan kualitas penanaman modal daerah
	Meningkatnya perekonomian desa	Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah	9	Optimalisasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
	Meningkatnya kemandirian transmigran		10	Peningkatan keterampilan dan keahlian transmigran serta sarpras permukiman transmigrasi
Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan				
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja	11	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja khususnya teknologi informasi
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga		12	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan	13	Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan				
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan	14	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah		15	Peningkatan akses pelayanan pendidikan berbasis IT
		Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	16	Melakukan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana				
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah	17	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah		18	Peningkatan kualitas tanggap bencana daerah
Peningkatan tata kelola pemerintahan				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sumatera Selatan	19	Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi serta manajemen pemerintah daerah
			20	Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		21	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi		22	Digitalisasi tata kelola kinerja pemerintahan daerah

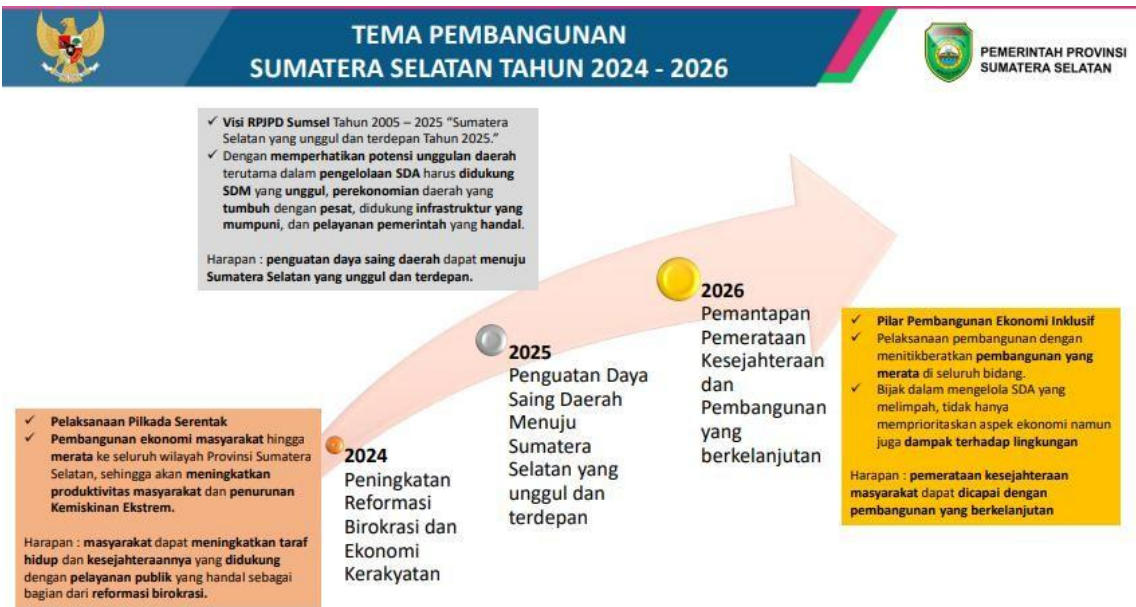
Sumber: RPD Provinsi Sumatera Sealatan Tahun 2024-2026

Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan, pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan disesuaikan dengan Fokus atau Tema Pembangunan Tahunan pada periode tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.3.

Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026



Sumber: RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Pembangunan tahun 2025 menjadi estafet pembangunan tahun 2024, berbagai capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan telah dicapai di 2024. Pada pembangunan tahun 2025 ini Provinsi Sumatera Selatan akan berfokus pada beberapa sektor yaitu ekonomi, infrastruktur dan sosial, dengan tema pembangunan, **“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”**. Sesuai dengan fokus dan tema pembangunan tahun 2025, dengan memperhatikan potensi unggulan daerah terutama dalam pengelolaan SDA harus didukung dengan SDM yang unggul, perekonomian daerah yang tumbuh dengan pesat, dengan dukungan infrastruktur yang mumpuni dan pelayanan pemerintah yang handal. Dengan penguatan daya saing daerah diharapkan mampu menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan.

Arah Kebijakan Pembangunan tersebut selain dijabarkan menjadi Tema Pembangunan, juga dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan pada RKPDP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Adapun dukungan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 terhadap Arah Kebijakan Tahun 2025 dalam RPD dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.4.
 Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap
 Arah Kebijakan RPD Tahun 2025

Arah Kebijakan RPD 2024-2026 untuk Tahun 2025	Tema RKPD Tahun 2025	Prioritas RKPD Tahun 2025
Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan:	Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan	
➤ Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja khususnya teknologi informasi ➤ Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial ➤ Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan		1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
➤ Penguatan kualitas agribisnis daerah ➤ Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perikanan ➤ Mendorong berkembangnya kewirausahaan daerah ➤ Menjaga produksi (supply) barang dan jasa secara periodic ➤ Optimalisasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan		2. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
➤ Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan ➤ Peningkatan kualitas tanggap bencana daerah		3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
➤ Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi serta manajemen pemerintah daerah ➤ Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT		4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

4.2.1.2. Telaah RKP Tahun 2025

Tema Pembangunan

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045 guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah dimanifestasikan pelaksanaannya ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan, yaitu tahap I 2025-2029: Penguatan Fondasi Transformasi,

tahap II 2030-2034: Akselerasi Transformasi, tahap III 2035-2039: Ekspansi Global, dan tahap IV 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas.

RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 menjadi fondasi awal yang menghubungkan transisi estafet pembangunan antara RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 dan antara RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, RKP Tahun 2025 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, tema RKP Tahun 2025 yang ditetapkan, yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2025 mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Adapun sasaran dan indikator pembangunan nasional pada RKP 2025 dan pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2025

Indikator Pembangunan	Target Nasional pada RKP 2025	Target Sumatera Selatan pada RKP 2025	Target Sumatera Selatan pada RKPD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5,3-5,5	5,3-5,5 ^{a)}
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	3,82 – 3,93	3,82 – 3,93 ^{a)}
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	9,37 – 10,37	9,37 – 10,37 ^{a)}
Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	0,316 – 0,320	0,316 – 0,320 ^{a)}

Indikator Pembangunan	Target Nasional pada RKP 2025	Target Sumatera Selatan pada RKP 2025	Target Sumatera Selatan pada RKPD 2025
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	0,53	0,53 ^{a)}
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6	69,97	69,97 ^{a)}
Nilai Tukar Petani (kumulatif)	113 – 115	-	109,56
Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	104 – 105	-	-

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

Keterangan: ^{a)} Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 15 Mei 2024

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran makro pembangunan di atas maka diperlukan sejumlah strategi dan kebijakan yang dilakukan di Sumatera Selatan diantaranya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi di sektor pertanian ke arah diversifikasi dan diferensiasi produk.
- 2) Mengoptimalkan potensi Sumsel sebagai lumbung pangan : Sumsel swa sembada pangan/beras, serta pengembangan *Food Estate* berbasis lahan rawa.
- 3) Membuat/memanfaatkan road map hilirisasi antara lain dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.
- 4) Melibatkan stake holders (terutama pihak investor) dalam membuat perencanaan pengembangan sektor, misalnya hilirisasi yang didukung dengan infrastruktur seperti jalan akses pelabuhan dan jalan akses rencana pabrik contohnya pada hilirisasi kelapa.
- 5) Redistribusi lahan melalui pelepasan kawasan hutan yang sudah ditanami sawit.
- 6) Mengoptimalkan konektivitas antara kabupaten/kota di wilayah Sumsel lain terutama terkait dengan program seperti OVOP.
- 7) Mengoptimalkan konektivitas antara wilayah terutama di pulau Sumatera terkait dengan pembangunan kawasan industri.
- 8) Mempersiapkan SDM Sumsel sesuai dengan kebutuhan pasar terutama dalam aspek Teknologi Informasi dan AI.
- 9) Meningkatkan “peran” UMKM di pasar lokal dan nasional diantaranya melalui penyaluran pembiayaan UMI, KUR, dan literasi keuangan.

- 10) Penciptaan lapangan kerja dan mengoptimalkan program pembekalan keterampilan kerja.
- 11) Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
- 12) Menjaga ketersediaan pasokan dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis, serta melakukan upaya pengendalian inflasi lainnya termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS).

Prioritas Nasional

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2025 seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.4.
Prioritas Nasional RKP Tahun 2025



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6.
 Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL RKP 2025	PRIORITAS DAERAH RKPD SUMATERA SELATAN 2025
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum - Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	- Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	- Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	- Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum - Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, masing-masing PN memiliki sasaran pembangunan, arah kebijakan, dan *highlight* intervensi. Adapun sasaran pembangunan dari setiap PN yang disandingkan dengan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merujuk pada Sasaran Pembangunan Daerah pada RPD Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7.
 Sandingan Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025
 dengan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2025

Sasaran Pembangunan PN pada RKP Tahun 2025	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2025
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Reformasi Birokrasi
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	Indeks Ekosistem Inovasi
Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	Indeks Entropi Theil
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Indeks Kepuasan Masyarakat
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan); Nilai Tukar Petani
Indeks Ketahanan Energi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan)
Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang mandiri
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks Ekosistem Inovasi
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL)
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persentase Penurunan Emisi GRK
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)
Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	Persentase Penurunan Emisi GRK
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	

Sasaran Pembangunan PN pada RKP Tahun 2025	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2025
Koperasi	
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum
Rasio Kewirausahaan (%)	
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	
Rasio PDB Pariwisata (%)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku
Devisa Pariwisata (miliar USD)	
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	
Aset Perbankan/PDB (%)	Opini BPK
Aset Dana Pensiun/PDB (%)	
Aset Asuransi/PDB (%)	
Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	Persentase peningkatan investasi
Total Kredit/PDB (%)	Opini BPK
Inklusi Keuangan (%)	
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
Hasil Pembelajaran:	
a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	Indeks Pembangunan Manusia; Rata-rata Lama Sekolah
b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah
c. Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Rata-rata Lama Sekolah
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Indeks Pembangunan Manusia Rata-rata Lama Sekolah
Tingkat Penguasaan Iptek:	
a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	Indeks Ekosistem Inovasi
b. Peringkat Indeks Inovasi Global	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	
Usia Harapan Hidup (tahun)	Usia Harapan Hidup
Kesehatan Ibu dan Anak:	
a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup
b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting; Persentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000	Usia Harapan Hidup

Sasaran Pembangunan PN pada RKP Tahun 2025	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2025
penduduk)	
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Usia Harapan Hidup
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
Rasio PDB Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan)
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Persentase peningkatan investasi
Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Neraca perdagangan; Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku
Biaya Logistik (% PDB)	
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial; Tingkat Kemiskinan; Gini Ratio; Pengeluaran per kapita
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	
Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB; Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Persentase desa mandiri	Persentase peningkatan desa maju dan mandiri
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang mandiri
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
Return on Asset (ROA) BUMN	Opini BPK
Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Daerah
Indeks Materi Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat; Nilai SAKIP

Sasaran Pembangunan PN pada RKP Tahun 2025	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2025
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Integritas Daerah
Indeks Pembangunan Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi
Rasio Perpajakan terhadap PDB	Opini BPK
Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi Daerah
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Pemuda; Rata-rata Lama Sekolah; Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Reformasi Birokrasi
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	Indeks Risiko Bencana Sumsel; Persentase penurunan tingkat kerentanan bencana; Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, diolah.

Selanjutnya, selain mendukung Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional, seluruh program daerah di dalam RKPD Tahun 2025 yang mengacu berdasarkan Program Prioritas Daerah di RPD Tahun 2024 – 2026 diharapkan berkontribusi dalam mendukung *highlight* intervensi dari setiap Prioritas Nasional pada RKP tahun 2025. Adapun sandingan keterkaitan *highlight* intervensi setiap Prioritas Nasional pada RKP 2025 dengan Program Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2025 yang mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8.
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional RKP 2025

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
PPN 1.1. : Memperkokoh Ideologi Pancasila	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila
PPN 1.2. : Penguatan Demokrasi	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD
PPN 1.3. : Penegakan Hak Asasi Manusia	
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana
Program Perlindungan Perempuan	Indeks Kepuasan Masyarakat PPA
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Dan terselesaikan
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
PPN 2.1. : Penguatan Sistem Keamanan Negara	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	- Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Prov Sumsel - Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan - Persentase Perda dan Perkada yang di tegakan - Persentase Satlinmas yang Aktif
PPN 2.2. : Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah
PPN 2.3. : Diplomasi Ekonnomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	
n/a	n/a
PPN 2.4. : Swasembada Pangan	
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Luas Pengembangan Tanaman Pangan
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Tertatanya prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program penyuluhan pertanian	Persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	- Skor Pola Pangan Harapan - Cadangan Pangan Daerah - Ketersediaan Energi - Ketersediaan Protein
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase peningkatan pendapatan KK miskin yang dibantu
Program pengawasan keamanan pangan	- Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Bersertifikat - Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Beredar Aman dan Bermutu (Komoditi Sayur dan Buah)
Program penyediaan dan pengembangan	Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
sarana pertanian	
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak
Program penyuluhan pertanian	Persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian
Program pengelolaan perikanan tangkap	Nilai Tukar Nelayan
Program pengelolaan perikanan budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan
Program Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Hutan sesuai dengan Dokumen Perencanaan tercapai
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Mengurangi kerusakan hutan, SDA dan ekosistemnya
PPN 2.5. : Swasembada Energi	
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa yang teraliri listrik
PPN 2.6. : Swasembada Air	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase pengelolaan Sumber Daya Air yang terlaksana
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Mengurangi luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
PPN 2.7. : Ekonomi Syariah	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan
PPN 2.8. : Ekonomi Digital	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan
PPN 2.9. : Ekonomi Hijau	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Yang Dikelola
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	- Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengoperasionalkan IPLT - Persentase Dokumen Sanitasi Regional yang tersusun - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak - Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten/kota
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah
Program pengembangan sistem dan	Persentase Dokumen Pendukung

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
pengelolaan persampahan regional	pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun
PPN 2.10. : Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Penhela Pertumbuhan Ekonomi (Prime Mover) dan Sumber Pertumbuhan Baru	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi
Program pengelolaan pelayaran	Jumlah trip perjalanan kapal
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
PPN 3.1. : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan
PPN 3.2. : Mendorong Kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terencana
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan
PPN 3.3. : Mengembangkan Industri Kreatif	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang termanfaatkan
Program pemasaran pariwisata	- Jumlah wisatawan mancanegara - Jumlah wisatawan nusantara
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Terlaksananya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
PPN 3.4. : Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi yang KSP/USPnya sehat
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	- Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha - Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Koperasi Aktif
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK
PPN 3.5. : Pendalaman Sektor Keuangan	
n/a	n/a
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Hak Kekayaan Intelektual

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	yang termanfaatkan
PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
PPN 4.1. : Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Program pengelolaan pendidikan	- Meningkatnya Angka Partisipasi - Meningkatnya Angka Partisipasi - Meningkatnya Raport Pendidikan SMK
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Penerapan Kurikulum di Sekolah
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D-IV/S-1
Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Perizinan Pendidikan yang terkendali
Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan
Program Pengawas Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan
Program Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan Budaya Baca dan Terkelolanya Perpustakaan sesuai Standar
PPN 4.2. : Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan kesejahteraan rakyat
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Penelitian yang terlaksana
PPN 4.3. : Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Kematian Ibu Maternal - Jumlah Kematian Bayi - Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan - Persentase Stunting pada anak balita - Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi - Rasio daya tampung rumah sakit rujukan - Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki Izin Edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber - PHBS
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
PPN 4.4. : Memperkuat Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota Pembangunan Kualitas Ketahanan Keluarga
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Yang Nilai Evaluasi KLA Mengalami Peningkatan
Program Perlindungan Perempuan	Indeks Kepuasan Masyarakat PPA
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Dan terselesaikan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	- Jumlah organisasi pemuda yang aktif - Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan - Jumlah wirausaha muda Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi, perlindungan sosial dan Pemenuhan kebutuhan dasarnya
PPN 4.5. : Meningkatkan Prestasi Olahraga	
Program pengembangan daya saing keolahragaan	- Jumlah atlet berprestasi - Jumlah medali atlet muda Sumsel - Jumlah pelatih yang bersertifikat - Jumlah pembinaan atlet muda - Jumlah pembinaan cabang olahraga - Jumlah Prestasi Olahraga - Peningkatan Prestasi Olahraga
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PPN 5.1. : Pengembangan Hilirisasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	
n/a	n/a
PPN 5.2. : Penguatan Industri Padat Karya Berkelanjutan, Industri Dasar, dan Industri Strategis Nasional	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan Sistem Informasi Industri
PPN 5.3. : Keberlanjutan Hilirisasi dan Industrialisasi	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian perencanaan dan pembangunan industri sesuai sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
Program Pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
PPN 5.4. : Pengembangan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tercapainya persentase pertumbuhan investasi Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Persentase Pengendalian Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tercapainya rasio tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan
Program pengembangan ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
PPN 6.1. : Membangun Desa dan Membangun dari Desa	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Persentase masyarakat yang difasilitasi dalam administrasi pemerintah desa - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Daerah
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	- Jumlah Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat - Persentase kelembagaan desa yang diberdayakan
Program Penataan Desa	- Persentase Lembaga Masyarakat yang Diberdayakan - Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan dan Kelembagaan Desa serta Prasarana dan Sarana Pemerintah Desa
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	- Persentase masyarakat yang terlibat dalam masyarakat desa - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Kerja Sama Desa
Program perencanaan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
	pembangunannya
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang berkembang
PPN 6.2. : Pemerataan Ekonomi	
Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan
PPN 6.3. : Memberantas Kemiskinan	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat pendapatannya
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di berdayakan
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi, perlindungan sosial dan Pemenuhan kebutuhan Dasarnya
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PPN 7.1. : Reformasi Politik	
Program Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun
Program Pencatatan Sipil	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik
PPN 7.2. : Reformasi Hukum	
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase kebijakan yang dirumuskan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana
PPN 7.3. : Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang kompeten dan kualified
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025	Indikator Program
	diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Program Penataan Organisasi	Persentase Organisasi yang tertata
PPN 7.4. : Pemberantasan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
n/a	n/a
PN 8: Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
PPN 8.1. : Masyarakat Adil, Makmur, dan Harmonis	
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Penurunan Kasus yang berpotensi konflik sosial
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Berkinerja
PPN 8.2. : Melestarikan Budaya	
Program pengembangan kebudayaan	- Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pergelaran Seni
PPN 8.3. : Penanganan Bencana	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat
Program Penanganan Bencana	Prosentase korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat provinsi

Sumber : RKP Tahun 2025, diolah.

Arah Kebijakan Pembangunan Penyelenggaraan Urusan

Dalam rangka menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Berbagai dukungan kebijakan prioritas pembangunan daerah berupa Program Daerah di sejumlah Perangkat Daerah yang dilaksanakan untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan nasional di setiap bidang urusan tersebut sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis

Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9.
Dukungan Program Daerah terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional Per Urusan Tahun 2025

No	Urusan	Outcome Prioritas	Dukungan Program Daerah
1.	Pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.	Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Penurunan Prevalensi Stunting	
		Keberhasilan Pengobatan TB	
		Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	
		Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	
		Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	
		Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengembangan Permukiman - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	
		Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Meningkatnya konektivitas wilayah	
		Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	
		ewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	
		Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	
		Lingkungan Hidup Berkualitas	
		Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	- Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	- Program Peningkatan Ketenteraman Ketertiban Umum
		Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	- Program Pencegahan,

No	Urusan	Outcome Prioritas	Dukungan Program Daerah
			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
6.	Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	- Program Penanganan Bencana - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pemberdayaan Sosial
		Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	
		Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
7.	Tenaga Kerja	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pengawasan Ketenagakerjaan - Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	
		Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	
		Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	- Program Perlindungan Khusus Anak - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	
		Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	
9.	Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	- Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat - Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	
		Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	
10.	Pertanahan	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	- Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
11.	Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Urusan	Outcome Prioritas	Dukungan Program Daerah
		Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Kehati) - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pencemaran Kerusakan Hidup - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Perlindungan Pengelolaan Hidup (PPLH) - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	- Program Pencatatan Sipil - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	
		Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	
		Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	
		Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	
15.	Perhubungan	Terwujudnya Konektivitas Nasional	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Pengelolaan Pelayaran - Program Pengelolaan Perkeretaapian
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi	
16.	Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan
		Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	

No	Urusan	Outcome Prioritas	Dukungan Program Daerah
			UMKM
18.	Penanaman Modal	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Peningkatan prestasi olahraga	- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	
20.	Statistik	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
21.	Persandian	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
22.	Kebudayaan	Kelestarian Cagar Budaya	- Program Pengembangan Kebudayaan
		Pemajuan Kebudayaan	- Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pembinaan Sejarah - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pengelolaan Permuseuman
23.	Perpustakaan	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	- Program Pembinaan Perpustakaan
		Pembangunan literasi masyarakat meningkat	- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
24.	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	- Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
25.	Kelautan dan Perikanan	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
26.	Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

No	Urusan	Outcome Prioritas	Dukungan Program Daerah
			dan Ekonomi Kreatif
27.	Pertanian	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan Meningkatnya Produksi Pertanian	- Program Kesehatan Kesehatan Veteriner - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
28.	Kehutanan	Peningkatan kemandirian usaha KUPS Peningkatan kemandirian usaha KTH Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative	- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - Program Pengelolaan Hutan
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
30.	Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif Meningkatnya perlindungan konsumen di daerah	- Program Pengembangan Ekspor - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
31.	Perindustrian	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
32.	Transmigrasi	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
33.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak bernegara bagi masyarakat	- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

No	Urusan	Outcome Prioritas	Dukungan Program Daerah
		Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan kewaspadaan nasional	
		Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	

Sumber: Hasil Rakortekrenbangnas Tahun 2024

4.2.1.3. Telaah Draft Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043

Salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan mengacu pada arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;

- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/ kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
- k. Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
- l. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043, kawasan strategis yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut.

a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. KSN Kawasan Taman Nasional Sembilang;
3. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
4. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung.

b. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sudut kepentingan terdiri dari 2 (dua) kawasan strategis yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

• Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
2. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya;
3. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya;
4. KPS Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
5. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya.

A. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 wilayah administrasi kabupaten yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
2. Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Betung, Kecamatan Suak Tapeh, dan Kecamatan Banyuasin III.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan PKW di sekitarnya;

- b. pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

B. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya

Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
3. wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
- b. pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuklinggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;

- c. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- f. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
- g. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan
- h. peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

C. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya

KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

- 1. Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
- 2. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan
- 3. Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;

- b. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
- c. pengembangan energi panas bumi sebagai salahsatu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang;
- d. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- f. menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

D. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi 4 wilayah administrasi yaitu:

- 1. Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- 2. Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
- 3. Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
- 4. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- c. pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional;
- e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- f. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan Kawasan.

E. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya

KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan
3. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. Pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata
- d. Pengembangan energi panas bumi sebagai salahsatu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- e. Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. Pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. Pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- h. Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung;
- i. Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Muara Sugihan), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Tulung Selapan.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
- b. penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- e. pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. melindungi kawasan pesisir dan pantai;
- g. menjaga keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir; dan
- h. peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi

4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) merupakan kesepakatan global, yang menjadi kerangka kerja pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan paradigma pembangunan mengarah pada internalisasi dampak lingkungan. Pergeseran paradigma pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan menjadi penting, mengingat TPB/SDGs didasarkan pada pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Adapun 17 tujuan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.5.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*
(TPB/SDGs)



Sumber : Seknas SDGs, diolah

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tetap berwawasan lingkungan (*Green Growth South Sumatra*). Selain itu, partisipasi dan keterlibatan lembaga non pemerintah guna mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan juga sangat diperlukan. Beberapa isu strategis dan upaya tindaklanjut pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan melalui Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 antara lain diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10.
Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjut Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Sumatera Selatan

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
Pilar Sosial		
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan	• Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur • Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	• Perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pengurangan beban dan kegiatan ekonomi produktif; • Integrasi Jamkesda dengan JKN menuju universal health coverage;

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
	layak dan berkelanjutan. - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. - Penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada penciptaan program kolaboratif dan berbasis peningkatan pendapatan	dan Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan sanitasi
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	- Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. - Prevelansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita. - Beragamnya faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus-kasus stunting.	Melakukan intervensi penurunan stunting terintegrasi antara gizi spesifik dan gizi sensitif secara holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS) pada sasaran prioritas di lokasi fokus pencegahan dan penurunan stunting.
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	- Angka kematian ibu; - Angka kematian bayi; - Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup; - Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B; - Obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun; dan - Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	- Meningkatkan Mutu Posyandu; - Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, berimbang dan beragam; - Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) berbasis kewilayahan; dan - Meningkatkan Cakupan Ante Natal Care (ANC) Sesuai Standar (10 T).
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat; - Rata rata lama sekolah; - Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik; dan - Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	- Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang; - Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah; - Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah; - Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; dan - Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi, Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan.

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	• Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial; • Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi); dan • Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. • Belum optimalnya komitmen dan partisipasi berbagai pihak dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak serta masih terbatasnya SDM dan Lembaga Pelindungan anak di daerah.	• Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak.
Pilar Ekonomi		
Tujuan 7 menjamin akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	• Rasio elektrifikasi; • Konsumsi listrik per kapita; dan • Rasio penggunaan gas rumah tangga.	• Emisi GRK sektor energi tahun 2017 197.483.207 ton CO2eq, melalui aksi mitigasi maka penurunan emisi GRK tahun 2030 hanya sebesar 0.60 persen
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	• Target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per kapita; • Peningkatan tenaga kerja formal; • Tingkat Pengangguran Terbuka; • Tingkat setengah pengangguran; • Upah rata rata per jam pekerja; dan • Pekerja informal sektor non-pertanian, • Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan yang masih pada <i>level middle income</i>.	• Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata; • Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal;
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang Tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	• Kondisi mantap jalan Provinsi; • Panjang pembangunan jalan tol; • Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita; dan • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	• Peningkatan dukungan pendanaan di sector jalan dan jembatan; • Fasilitasi pemerintah daerah dalam pembebasan lahan; • Mendorong Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan Tol untuk segman yang belum; • Pengembangan Kawasan industri dan KEK; dan • Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan Mall pelayanan publik.

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	• rata- rata pertumbuhan ekonomi tertinggal; dan • persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. • Tingkat gini rasio selama masih pada tingkat moderat.	• Perlu adanya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Tujuan 17 menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	• Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	• Memaksimalkan PAD dari sumber pajak dengan kemudahan dan peningkatan pelayanan; • Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari BUMD.
Pilar Lingkungan		
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	• Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; • Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; dan • Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	• Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk pelayanan air minum layak.
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	• Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama; • Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI); dan • Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. • Tingginya kejadian bencana di Sumsel • Belum adanya sistem peringatan dini • Terbatasnya desa tangguh bencana • Belum maksimalnya penanganan bencana yang disebabkan akses ke lokasi yang sulit dijangkau.	• Perlu meningkatkan Indeks Tutupan Lahan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan lahan yang terjadi tahun 2015.
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	• Jumlah Perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan yang baik masih sedikit.	
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	• Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	• Melakukan mitigasi di 4 sektor sehingga target penurunan emisi GRK tahun 2030 mencapai 11.96%.
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan	• Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); • Jumlah luas kawasan	• Perlu segera ditetapkan RZWP3K sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang laut dan pesisir.

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan	konservasi perairan.	
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	- Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas; - Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	- Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran /perdagangan tumbuhan dan satwaliar; - Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi; dan - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati.
Pilar Hukum dan Tata Kelola		
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang kokoh	- Indeks Kebebasan Sipil; - Indeks Hak-hak Politik; - Persentase anak yang memiliki akta kelahiran - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi masih dalam kategori sedang (B)	- Penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan; dan - Kemudahan akses penduduk terhadap informasi publik.

4.2.1.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Rekomendasi kebijakan dari DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran diarahkan untuk selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat
- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, kurangnya bahan literasi perpustakaan, perlunya pembangunan/perbaikan gedung sekolah, kelas belajar, dan fasilitas gedung/lapangan

- olahraga, pembangunan fasilitas laboratorium, penyediaan mobiler kelas, peralatan seni, dan bantuan beasiswa.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti bantuan renovasi puskesmas dan bantuan gizi untuk bayi.
 - c. Kurangnya akses air minum/air bersih sehingga perlunya penyediaan air bersih melalui penyediaan tanki air, instalasi pipa, pembuatan sumur bor, dan pembuatan embung (waduk) penampungan air.
 - d. Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial seperti masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdaftar di PBI.
 - e. Kurangnya pembinaan dan pengembangan olahraga seperti kurangnya sarana dan prasarana olahraga.
 - f. Kurangnya keterampilan tenaga kerja seperti belum adanya pelatihan bagi tenaga kerja serta perlunya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
2. Permasalahan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
- a. Kurangnya akses infrastruktur jalan seperti perlunya pembangunan/perbaikan jalan, baik jalan provinsi, jalan poros/lingkungan/lingkar desa, jalan lingkungan, jalan permukiman, jalan/jalur lalu lintas pertanian, jalan menuju perkebunan, jalan menuju sekolah, dan jalan produksi.
 - b. Kurangnya akses infrastruktur jembatan seperti perlunya pembangunan/perbaikan akses jembatan penghubung antar desa dan jembatan gantung.
 - c. Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman seperti sumur bor.
 - d. Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang salah satunya mengakibatkan banjir sehingga perlu pembuatan/perbaikan siring/gorong-gorong, talud, dan embung.
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian seperti bantuan bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian diantaranya traktor dan *combine harvester*.
 - f. Kurangnya sarana perkebunan seperti bantuan bibit buah-buahan.
 - g. Kurangnya sarana dan prasarana peternakan seperti bantuan untuk ternak kambing dan sapi.

- h. Kurang optimalnya pengelolaan perikanan budidaya seperti bantuan untuk lahan lebak lebung.
 - i. Jaringan irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak sehingga perlunya pembangunan/perbaikan irigasi pertanian/sawah, revitalisasi sawah, siring, dan normalisasi sungai.
 - j. Kurang optimalnya pengembangan UMKM seperti bantuan untuk alat tenun songket.
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan yang dapat menyebabkan terjadi kecelakaan dan tindak kriminal di malam hari sehingga perlunya bantuan pemasangan lampu penerangan jalan.
3. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- a. Tingginya potensi bencana longsor sehingga perlunya pembangunan tembok penahan.
 - b. Tingginya potensi bencana banjir sehingga perlunya pembangunan siring dan DAM.
 - c. Tingginya potensi genangan di jalan yang rawan banjir sehingga perlunya pembuatan siring pasang dan siring lingkungan.
 - d. Kurangnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Persampahan Regional termasuk kurangnya penyediaan bak sampah.
 - e. Penyempitan badan sungai dan sedimentasi tinggi sehingga perlunya normalisasi anak sungai.
4. Permasalahan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
- a. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana Keagamaan seperti pembangunan gedung Taman Pendidikan Alqur'an (TPA), pembangunan musholla, dan renovasi masjid.
 - c. Kurang Optimalnya Penataan Desa seperti pembangunan dan bantuan sarana dan prasarana kantor desa.

Seluruh permasalahan dari pokok-pokok pikiran tersebut termuat di dalam Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 yang keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11.
 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dan
 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
➤ Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan ➤ Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan ➤ Kurangnya akses air minum/air bersih ➤ Kurangnya pembinaan dan pengembangan Olahraga ➤ Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial ➤ Kurangnya keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
➤ Kurangnya akses infrastruktur jalan ➤ Kurangnya akses infrastruktur jembatan ➤ Kurangnya prasarana peternakan ➤ Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman ➤ Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ➤ Kurangnya sarana pertanian ➤ Kurangnya prasarana pertanian ➤ Kurangnya sarana perkebunan ➤ Kurang optimalnya pengelolaan perikanan budidaya ➤ Jaringan Irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak ➤ Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan ➤ Kurang optimalnya pengembangan UMKM	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
➤ Tingginya potensi bencana longsor ➤ Tingginya potensi bencana banjir ➤ Tingginya potensi genangan di jalan yang rawan banjir ➤ Kurangnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Persampahan Regional ➤ Penyempitan badan sungai dan sedimentasi tinggi	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
➤ Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ➤ Kurangnya sarana dan prasarana Keagamaan ➤ Kurang Optimalnya Penataan Desa	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

4.2.1.6. Telaah Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis didasarkan pada permasalahan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan tahun 2023 dalam RPJMD dan RKPD, arah kebijakan RPD, arah kebijakan RKP,

Rancangan Awal RPJPD, serta perkembangan isu terkini yang akan dihadapi sebagaimana tercantum pada Bab II buku RKPD ini. Berdasarkan perumusan tersebut, terdapat 6 (enam) isu strategis Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan *Stunting*
2. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi
4. Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung Pemerataan Infrastruktur
5. Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana
6. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Seluruh isu strategis tersebut dilakukan penelaahan dan dirumuskan menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun konsistensi antara isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12.
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dengan Isu Strategis Tahun 2025

Isu Strategis Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
➤ Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan <i>Stunting</i> ➤ Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
➤ Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi ➤ Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung Pemerataan Infrastruktur	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
➤ Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
➤ Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui program/kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan kriteria :

1. Memenuhi kriteria Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial;
2. Mendukung dan sinergi dengan target sasaran dalam RPD 2024-2026
3. Menjawab isu-isu strategis yang faktual dan mendasar serta mengatasi masalah-masalah sebagaimana yang direkomendasikan;
4. Merupakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Sesuai dengan ketersediaan dan prioritas anggaran.

PRIORITAS DAERAH I

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja :

1. Nilai Tukar Petani : 109,56

Program Nomenklatur :

- 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Rp. 250.000.000) (Disbun)
- 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Rp. 671.800.000) (Dinas Pertanian TPH)
- 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Rp. 700.000.000) (Dinas Pertanian TPH)
- 4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Rp. 500.000.000) (Dinas Perkebunan)
- 5. Program Penyuluhan Pertanian (Rp. 5.130.000.000) (DKPP)
- 6. Program Penyuluhan Pertanian (Rp. 34.809.302.000) (Dinas Pertanian TPH)
- 7. Program Penyuluhan Pertanian (Rp. 6.320.000.000) (Dinas Perkebunan)
- 8. Program Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 300.000.000)
- 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Rp. 1.400.000.000)
- 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Rp. 1.330.000.000)
- 11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Rp. 575.000.000)
- 12. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Rp. 2.973.642.461) (Dinas Perkebunan)
- 13. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Rp. 34.654.500.000) (Dinas Pertanian & TPH)
- 14. Program Perizinan Usaha Pertanian (Rp. 75.000.000)
- 15. Program Pendidikan Dan Pelatihan. Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan (Rp. 721.000.000)
- 16. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (Rp. 200.000.000)
- 17. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (Rp. 2.025.000.000)
- 18. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 24.600.336.335) Dinas Kelautan & Perikanan
- 19. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 52.448.175.825) Dinas Pertanian TPH
- 20. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 15.917.644.882) Dinas Perkebunan

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : Dinas Pertanian TPH, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan SDM

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Nelayan, Kelompok Peternakan

Indikator Kinerja :

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan: 94%

Program Nomenklatur :

- 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 154.958.449.000) (Dinkes)
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Rp. 760.000.000) (Dinkes)
- 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (Rp. 697.028.000)
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Rp. 2.738.031.500) (Dinkes)
- 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 1.069.946.000) (RS Mata)
- 6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 400.000.000) (RS Gigi & Mulut)
- 7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 237.489.468.993) (RSUD Siti Fatimah)
- 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Rp. 37.000.000.000) (RSUD Siti Fatimah)
- 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Rp. 1.100.000.000) (RSUD Siti Fatimah)
- 10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 8.903.283.067) (RS Erba)
- 11. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Rp. 385.200.000) (RS Erba)
- 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 97.561.000.000) (RS Sifat)
- 13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 34.343.469.000) (RS Erba)
- 14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 32.741.011.000) (RS Mata)
- 15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 216.380.360.500) (Dinkes)
- 16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 12.680.170.000) (RS. Gimul)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Kesehatan, RS. Ernaldi Bahar, RS. Mata, Rs. Gigi dan Mulut, RS. Siti Fatimah

Indikator Kinerja :

Tingkat Kesempatan Kerja : 96,05%

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja : Rp. 8.100.000

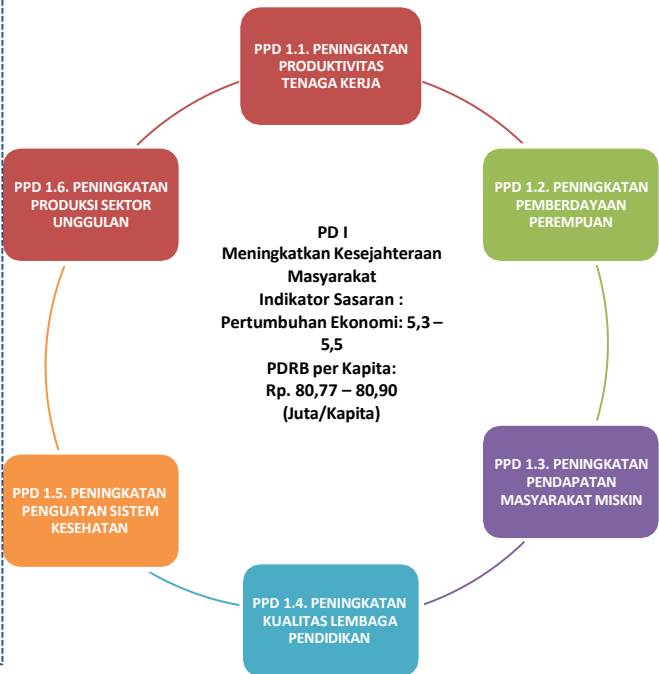
Program Nomenklatur :

- 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja (Rp. 100.000.000)
- 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. 465.000.000)
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja (Rp. 730.000.000)
- 4. Program Hubungan Industrial (Rp. 243.000.000)
- 5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (Rp. 525.000.000)
- 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 30.727.593.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Total Pagu PPD : Rp. 32.790.593.000



Indikator Kinerja :

Persentase sekolah menengah terakreditasi A: 43%

Program Nomenklatur :

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan (Rp. 393.372.558.000)
- 2. Program Pengembangan Kurikulum (Rp. 679.340.000)
- 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Rp. 2.749.750.000)
- 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (Rp. 0)
- 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Rp. 7.103.350.250)
- 6. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (Rp. 73.882.693.632)
- 7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Rp. 5.700.000.000)
- 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 1.207.893.413.000) (Disdik)
- 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 23.895.969.550) (Dispora)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja :

IPG : 94,47

Program Nomenklatur :

- 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Rp. 1.700.000.000)
- 2. Program Perlindungan Perempuan (Rp. 512.400.000)
- 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Rp. 300.000.000)
- 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Rp. 250.000.000)
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (Rp. 610.000.000)
- 6. Program Perlindungan Khusus Anak (Rp. 1.270.000.000)
- 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 12.242.158.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja :

Pengeluaran Per Kapita : Rp. 11.364 Ribu

Program Nomenklatur :

- 1. Program Pemberdayaan Sosial (Rp. 680.000.000)
- 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Rp. 50.000.000)
- 3. Program Rehabilitasi Sosial (Rp. 11.272.830.000)
- 4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Rp. 7.664.584.902)
- 5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Rp. 250.000.000)
- 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Rp. 150.000.000)
- 7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Rp. 150.000.000)
- 8. Program Pengelolaan Hutan (Rp. 1.920.000.000)
- 9. Program Kesejahteraan Rakyat (Rp. 24.125.132.820)
- 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 23.336.892.000) (Dinsos)
- 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 2.874.867.180) (Biro Kesra)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Biro Kesra

**PRIORITAS
DAERAH I**
**Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat**

Indikator Kinerja :
Persentase Cadangan Pangan : 100%

Program Nomenklatur :

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (Rp. 500.000.000)
- 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Rp. 2.235.000.000)
- 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan (Rp. 500.000.000)
- 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan (Rp. 600.000.000)
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 28.202.757.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Indikator Kinerja :
Nilai Tukar Peternak (NTPT)

Program Nomenklatur :

- 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Rp. 1.300.000.000) (DKPP)
- 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Rp. 1.875.000.000) (DKPP)
- 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Rp. 825.000.000)
- 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rp. 950.000.000)(Dinas Kelautan dan Perikanan)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan

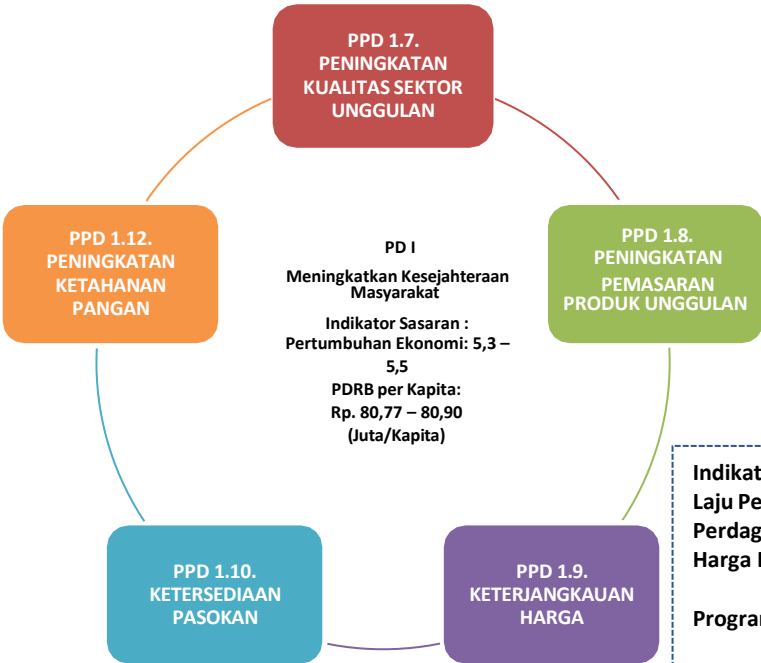
Indikator Kinerja :
Neraca Perdagangan : 5,253 (Juta US\$)

Program Nomenklatur :

- 1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Rp. 370.000.000)
- 2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Rp. 2.000.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perdagangan



Indikator Kinerja :
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok : <5%

Program Nomenklatur :

- 1. Program Pengembangan Ekspor (Rp. 900.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perdagangan

Indikator Kinerja :
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk Harga Berlaku : 10%

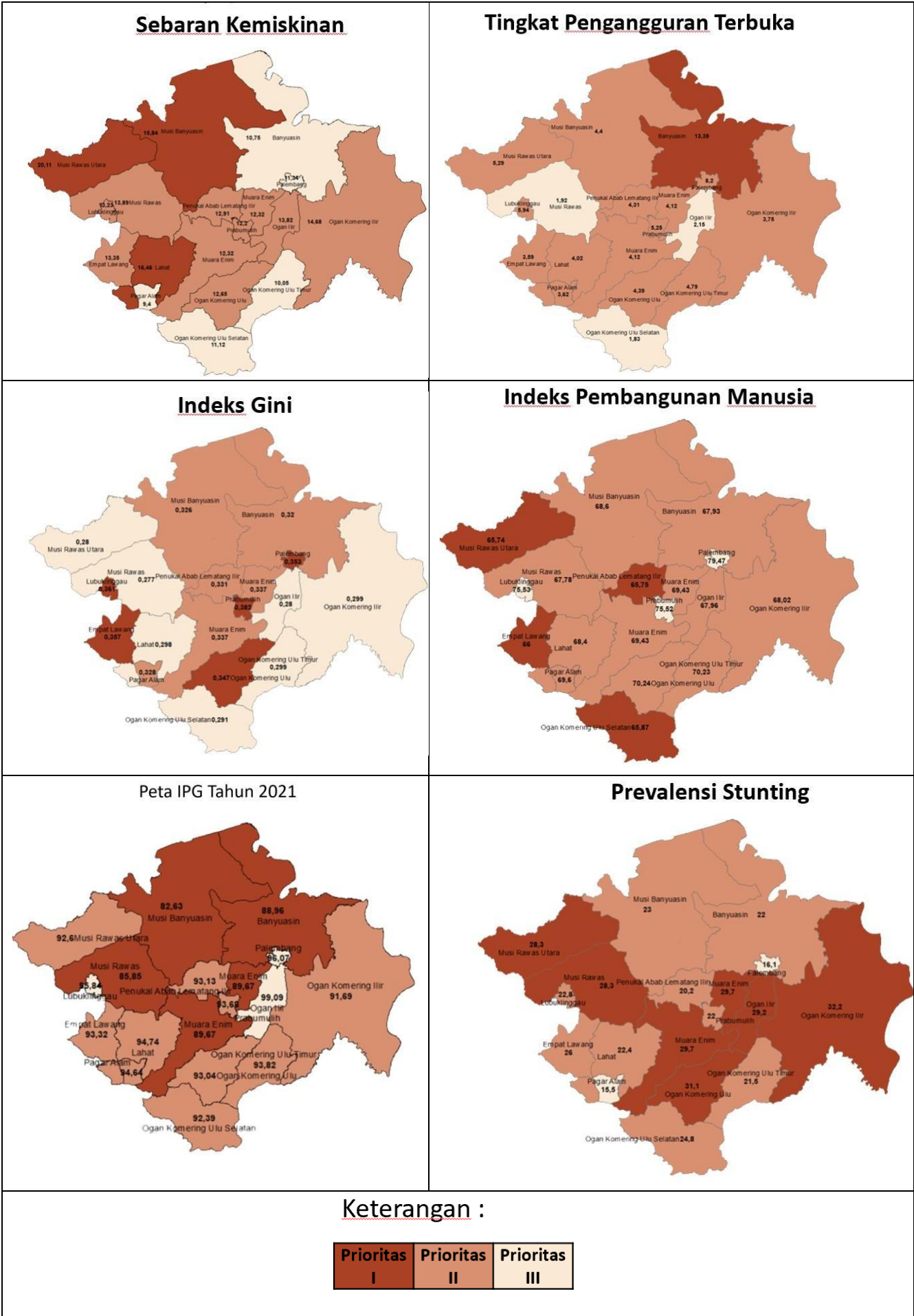
Program Nomenklatur :

- 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Rp. 850.000.000)
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 12.935.410.660)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perdagangan

Prioritas Wilayah untuk Prioritas Daerah 1
(Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)



PRIORITAS
DAERAH II

Pembangunan
Infrastruktur dan
Ekonomi Kerakyatan

Indikator Kinerja :
Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat : 18

Program Nomenklatur :

1. Program Pembinaan Perpustakaan (Rp. 4.815.000.000)
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (Rp. 650.000.000)
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 17.398.161.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perpustakaan

Indikator Kinerja :
Persentase Peningkatan Produk
Komoditas Sektor Unggulan
Pertanian yang berkualitas :
40

Program Nomenklatur :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Rp. 1.900.000.000)
2. Program Perekonomian Dan Pembangunan (Rp. 3.836.094.000) (Biro Perekonomian)
3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Rp. 1.975.000.000) (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 17.458.131.000)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 1.363.906.000) (Biro Perekonomian)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian

Indikator Kinerja :
Pertumbuhan Nilai PDRB
Industri Pengolahan : 5,15

Program Nomenklatur :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (Rp. 3.262.472.000)
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (Rp. 350..000.000)
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (Rp. 400.000.000)
4. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (Rp. 485.879.000) (DESDM)
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (Rp. 960.000.000) (DESDM)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 12.430.862.900) (Dinas Perindustrian)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 24.787.789.975) (DESDM)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perindustrian

Indikator Kinerja :
Indeks Desa Membangun : 0,77

Program Nomenklatur :

1. Program Peningkatan Kerja Sama Desa (Rp. 1.225.000.000)
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa (Rp. 3.836.530.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : DPMD

PD II
Meningkatkan Infrastruktur
dan Ekonomi Kerakyatan

Indikator Sasaran:
Indeks Williamson: 0,735

PPD 2.6. PENINGKATAN
LITERASI MASYARAKAT

PPD 2.1. PENINGKATAN
PRODUKSI SEKTOR
UNGGULAN

PPD 2.2. PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS SEKTOR
INDUSTRI PENGOLAHAN
DAERAH BERBASIS SEKTOR
UNGGULAN

PPD 2.5. PENINGKATAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
UNGGULAN DAN POTENSIAL
DESA

PPD 2.3. PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG PARIWISATA

PPD 2.4. PENINGKATAN
KELANCARAN DISTRIBUSI

Indikator Kinerja :
Rasio Konektivitas Provinsi : 99,2

Program Nomenklatur :

1. Program Penyelenggaraan Jalan (Rp. 461.244.998.822)
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Rp. 20.791.235.987)
3. Program Pengelolaan Pelayaran (Rp. 12.500.000.000)
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian (Rp. 575.282.300)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 74.266.055.673) (PU Bina Marga)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 40.331.073.353) (Dishub)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas PU Bina Marga, Dishub

Indikator Kinerja :
Jumlah Wisatawan
Mancanegara : 12,90 –
16,96
Jumlah Wisatawan Nusantara :
1.700.000

Program Nomenklatur :

1. Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Rp. 1.475.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

PRIORITAS
DAERAH II

Pembangunan
Infrastruktur dan
Ekonomi Kerakyatan

Indikator Kinerja :
Realisasi PMA : 21,90 T
Realisasi PMDN : 10,47 T

Program Nomenklatur :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Rp. 2.450.000.000)
2. Program Promosi Penanaman Modal (Rp. 1.400.000.000)
3. Program Pelayanan Penanaman Modal (Rp. 700.000.000)
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Rp. 2.056.878.578)
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Rp. 200.000.000)
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (Rp. 100.000.000) (Dinas Perdagangan)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 19.196.704.000) (DPMPTSP)

Lokasi: Prov. Sumsel
OPD : DPMPTSP

Indikator Kinerja :
Kapasitas Air Baku :

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Rp. 92.068.371.039)
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Rp. 7.000.000.000)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Rp. 1.250.000.000)
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (Rp. 1.010.000.000)
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (Rp. 1.300.000.000)
6. Program Penataan Bangunan Gedung (Rp. 5.455.000.000)
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Rp. 2.870.000.000)
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi (Rp. 4.617.100.000)
9. Program Kawasan Permukiman (Rp. 18.900.000.000)
10. Program Pengembangan Permukiman (Rp. 6.150.000.000)
11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (Rp. 51.340.000.000)
12. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Rp. 200.000.000)
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 32.782.967.921) (PSDA)
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 33.548.334.678) (Dinas Perkim)

Lokasi: Prov. Sumsel
OPD : Dinas PSDA, Dinas Perkim, Dinas PUBMTR

Indikator Kinerja :
Persentase Peningkatan Desa
Maju dan Mandiri : 6,22

Program Nomenklatur :

1. Program Penataan Desa (Rp. 100.000.000)
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (Rp. 3.705.937.000)
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 13.154.586.928)

Lokasi: Prov. Sumsel
OPD : Dinas PMD

Indikator Kinerja :
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Harga Berlaku : 1,10%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengembangan Kebudayaan (Rp. 5.950.000.000)
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Rp. 300.000.000)
3. Program Pembinaan Sejarah (Rp. 207.196.001)
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Rp. 275.000.000)
5. Program Pengelolaan Permuseuman (Rp. 5.161.722.000)
6. Program Pemasaran Pariwisata (Rp. 5.500.000.000)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 26.288.680.100)

Lokasi: Prov. Sumsel
OPD : Dinas Kebudayaan & Pariwisata

PD II
Pembangunan Infrastruktur
dan Ekonomi Kerakyatan

Indikator Sasaran:
Indeks Williamson: 6,39
IKLH: 71.98

Indikator Kinerja :
Persentase Satuan
Permukiman Transmigrasi
yang Mandiri : 75

Program Nomenklatur :

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (Rp. 200.000.000)
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Rp. 210.000.000)
3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Rp. 50.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel
OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Kinerja :
Persentase Koperasi Aktif : 66,31%

Program Nomenklatur :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (Rp. 100.000.000)
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Pinjam (Rp. 150.000.000)
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (Rp. 100.000.000)
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (Rp. 100.000.000)
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (Rp. 400.000.000)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 14.432.325.800)

Lokasi: Prov. Sumsel
OPD : Dinas Koperasi dan UMKM

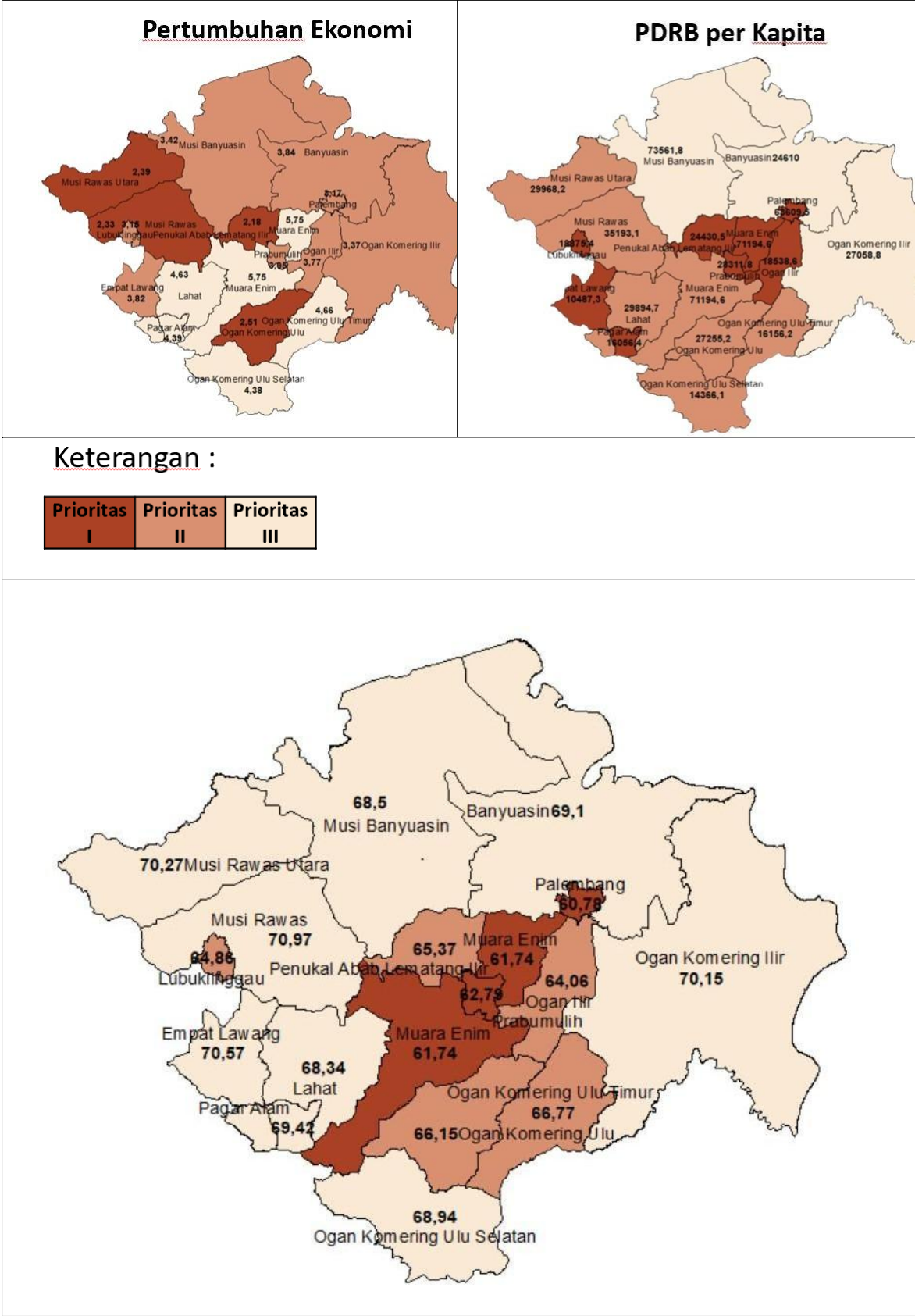
Indikator Kinerja :
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha :
3,5%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Rp. 200.000.000)
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Rp. 550.000.000)
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (Rp. 376.000.000)
4. Program Pengembangan UMKM (Rp. 500.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel
OPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM

Prioritas Wilayah untuk Prioritas Daerah 2
(Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan)



PRIORITAS
DAERAH III

Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana

Indikator Kinerja :
IKU : 87,90

Program Nomenklatur :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 20.829.663.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : SatPol PP, BPBD

Indikator Kinerja :
Capaian Penurunan Emisi GRK
Sektor Limbah : 88.268,00 Ton
CO2 eq/Tahun

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Rp. 1.550.000.000)
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (Rp. 200.000.000)
3. Program Pengelolaan Persampahan (Rp. 250.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perkim, DLHP

Indikator Kinerja :
Indeks Penurunan Tingkat
Kerentanan Bencana : 136,85

Program Nomenklatur :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Rp. 807.656.590) (Satpol PP)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Satpol PP

Indikator Kinerja :
IKA : 60,13

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Rp. 50.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Kehutanan

PD III
Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana

Indikator Sasaran :
IKLH : 71,98
Persentase Penurunan
Emisi GRK : 8,66

PPD 3.5. PENINGKATAN
KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN EDUKASI RAWAN
BENCANA

Indikator Kinerja :
Persentase Penduduk Daerah
Rawan Bencana Yang
Mendapatkan Pelayanan
Komunikasi, Informasi Dan
Edukasi Bencana : 100%

Program Nomenklatur :

1. Program Penanggulangan Bencana (Rp. 7.314.097.129)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : BPBD

Indikator Kinerja :
Persentase Warga Negara Korban
Bencana yang Memperoleh
Rumah Layak Huni : 83%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengembangan Perumahan (Rp. 2.748.900.000)
2. Program Penanganan Bencana (Rp. 1.460.000.000)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Perkim, Dinas Sosial

Indikator Kinerja :
IKU : 87,90

Program Nomenklatur :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Rp. 325.000.000)
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Rp. 2.580.000.000)
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (Rp. 500.000.000)
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Rp. 200.000.000)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH (Rp. 100.000.000)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Rp. 900.000.000)
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Rp. 1.300.000.000)
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Rp. 700.000.000)
9. Program Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya (100.000.000)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 36.592.509.537) (DLHP)
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 54.909.890.978) (Dishut)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : DLHP, Dinas Kehutanan

Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

Program Nomenklatur :

- Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

DPD : BKD, BPSDMD, Inspektorat, Biro Ortala, Biro Adpem, Biro Pemerintahan, Bappeda, BPKAD

Program Nomenklatur :

- Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : Dinas Kearsipan, BPKAD, Biro PBJ

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Rp. 9.925.000.000)
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Rp. 4.150.000.000)
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Rp. 550.000.000)
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Rp. 300.000.000)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 17.446.128.302)

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : Diskominfo

Indikator Kinerja :
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan : 100%
Persentase Perda & Perkada yang ditegakkan : 95%

Program Nomenklatur :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Rp. 3.310.000.000)
2. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum (Rp. 2.680.000.000)
3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Rp. 216.061.930.000)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 36.570.126.808) (Satpol PP)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 2.061.923.000) (Biro Hukum)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 176.027.087.448) (Sekretariat DPRD)

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : Satpol PP, Biro Hukum, Sekretariat
DPRD

Indikator Kinerja :
Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Selatan : 81,79-85,04%

Program Nomenklatur :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Rp. 7.287.142.774)
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Rp. 15.007.525.000)
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Rp. 2.300.000.000)
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (Rp. 3.400.000.000)
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (Rp. 3.807.971.100)
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong (Rp. 350.000.000) (DLHP)
7. Program Penatagunaan Tanah (Rp. 200.000.000) (DLHP)
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 14.860.594.000) (Kesbangpol)

Lokasi: 17 Kab/Kota. Prov. Sumsel

OPD : Kesbangpol

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Ormas dan

Indikator Kinerja :
Indeks Kepuasan Masyarakat : 70,5%

Program Nomenklatur :

1. Program Pendaftaran Penduduk (Rp. 400.000.000)
2. Program Pencatatan Sipil (Rp. 285.000.000)
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Rp. 511.000.000)
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Rp. 36.000.000)
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Rp. 220.000.000) (Bapenda)
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Rp. 9.956.064.300)
7. Program Pelayanan Penghubung (Rp. 1.200.000.000)
8. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (Rp. 98.000.000)
9. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (Rp. 200.000.000)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 10.190.404.000) (Disdukcapil)
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 259.076.929.169) (Bapenda)
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 13.503.567.472) (Badan Penghubung)
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 46.000.500.000) (Biro Humas dan Protokol)
- 14.

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : Disdukcapil, Bapenda, Badan Penghubung, Dinas Sosial